

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Kondisi tersebut antara lain ditandai dengan harga barang yang meningkat sehingga nilai beli dan konsumsi masyarakat menurun. Hampir semua kegiatan baik perusahaan besar maupun perusahaan berskala kecil mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kebangkrutan, akibatnya jumlah pengangguran semakin meningkat.

Pemerintah melakukan kegiatan penyelamatan (*rescue*) dengan memberikan bantuan secara finansial melalui proyek Jaringan Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). Program ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja produktif bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dan mengkoordinasi berbagai program pembangunan penanggulangan dampak kemiskinan.

Terjadinya krisis telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan. Program tersebut diperlukan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan.

Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, dimulai tahun anggaran 1999/2000. Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan program khusus yang didasarkan pada Inpres Nomor 5 tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program khusus tersebut dikenal dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam Manual P2KP (1999: 5) disebutkan bahwa “dalam rangka menunjang pelaksanaan program, Pemerintah Republik Indonesia melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga donor melalui Bank Dunia. Pinjaman tersebut dialokasikan mulai

tahun 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000/2001, yang disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-KSM) di kelurahan sasaran di Pulau Jawa”.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program yang dilaksanakan di perkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Desain program mengarah pada peningkatan keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pengambil keputusan yang lebih besar, dengan pendekatan pemberdayaan institusi lokal. Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja, sepengetahuan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang ditunjuk, dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif,

pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dana yang dipergunakan untuk modal usaha produktif merupakan dana pinjaman bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat melalui suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat, dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Wadah dimaksud merupakan kelembagaan masyarakat yang disebut *badan keswadayaan masyarakat* (BKM), yang beranggotakan para tokoh masyarakat dan perwakilan KSM, serta warga.

Sementara dana untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, namun masyarakat harus menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawabnya untuk dapat melakukan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut. Dana hibah ini diprioritaskan kepada jenis-jenis prasarana dan sarana yang dapat memberikan dampak langsung kepada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana yang dimaksud di sini dapat berupa pembangunan yang baru dan perbaikan yang lama.

Pengelolaan seluruh kegiatan, baik pengembangan usaha maupun pembangunan prasarana dan sarana, pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan, semuanya dilakukan dengan pendekatan bertumpu pada kelompok. Pendekatan semacam ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sedapat

mungkin bersifat padat karya dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta memperkuat kelembagaannya.

Berdasarkan hasil evaluasi perguliran dana, pelaksanaan pengembalian pinjaman dan perguliran dana, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan: belum dilaksanakannya perguliran dana sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (Yayasan Mitra Persada, 2001), hasil evaluasi sesuai dengan laporan progress report KMW SWK IV (Kota Bandung) yang menggambarkan bahwa pemanfaatan dana belum sepenuhnya sesuai dengan program. Terjadinya pelaksanaan guliran dana yang belum sesuai dengan program disebabkan dananya digunakan untuk kebutuhan konsumtif oleh KSM dan usulan usaha KSM berupa jenis usaha jangka panjang yang penanganannya perlu pengetahuan dan keahlian yang memadai (KMW SWK IV, 2001).

Kemacetan pengembalian pinjaman di tingkat KSM disebabkan masih lemah monitoring dan evaluasi serta pendampingan KSM oleh Manajer atau Pengelola BKM, serta dari sisi *business marketing* masih belum menunjukkan hasil. Hal ini ditunjukkan oleh indikator: belum terealisasinya peta usaha atau kegiatan usaha KSM secara menyeluruh, belum aktifnya Manajer atau Pengelola BKM memfasilitasi pengembangan usaha KSM, belum mampu mengupayakan bahan baku untuk usaha KSM sejenis, termasuk belum mampunya BKM mempromosikan dan memasarkan produk-produk KSM (Supadi, 2001).

Fenomena kemacetan pengembalian pinjaman menjadi persoalan yang cukup menarik dan juga menimbulkan pertanyaan, mengenai permasalahan yang terjadi baik di BKM maupun di KSM, apakah Manajer BKM tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu organisasi atau pelaksanaan fungsi manajemennya yang tidak baik, apakah para KSM tidak diberikan pembinaan oleh BKM atau para KSM tidak merasa memiliki akan keberadaan BKM dan tidak memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan dana tersebut. Kemacetan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dana belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian mengenai proses manajemen mengenai pengaruh kemampuan manajerial pengelola dana serta pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan judul penelitian **“PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA P2KP DI KELURAHAN SUKAGALIH, KECAMATAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG”**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana P2KP yang dilakukan oleh institusi lokal yang sengaja dibentuk di tingkat kelurahan yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan fenomena yang menarik. Di dalam institusi lokal ini (BKM) terlibat peran serta masyarakat baik sebagai pengurus BKM ataupun

sebagai anggota KSM dalam upaya mencapai tujuan program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS) secara tepat guna dan berhasil guna (efektif, efisien).

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah seberapa jauh keberhasilan (Efektivitas Kinerja) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BKM dalam pengelolaan dana P2KP, serta bagaimana partisipasi aktif masyarakat (KSM) agar dana bantuan yang diberikan sesuai dengan harapan yaitu bahwa dana tersebut tepat guna dan berhasil guna (produktif, efektif dan efisien) dalam program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi efektivitas pengelolaan dana, kemampuan manajerial dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Bandung.
2. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan program P2KP (kinerja BKM) dipengaruhi kemampuan manajerial pengurus BKM.
3. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan program P2KP (kinerja BKM) dipengaruhi partisipasi KSM.
4. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan program P2KP (kinerja BKM) dipengaruhi kemampuan manajerial dan partisipasi KSM.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data tentang kinerja lembaga-lembaga bentukan program P2KP (BKM) yang menggambarkan keberhasilan atau efektivitas pencapaian tujuan program dan efisiensi yang diukur dalam hubungannya dengan kemampuan manajerial pengurus, dan tingkat partisipasi masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi efektivitas pengelolaan dana, kemampuan manajerial dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Bandung.
2. Pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap efektivitas pelaksanaan program P2KP (kinerja BKM).
3. Pengaruh partisipasi KSM terhadap efektivitas pelaksanaan program P2KP (kinerja BKM).
4. Pengaruh kemampuan manajerial pengurus BKM dan partisipasi KSM terhadap efektivitas pelaksanaan program P2KP (kinerja BKM) dalam pengelolaan dana penanggulangan kemiskinan.



#### 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh berbagai masukan, sehingga memberikan manfaat dan kegunaan baik guna teoritis maupun guna laksana sebagai berikut:

1. *Guna teoritis*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna konseptual bagi perkembangan ilmu ekonomi manajemen dan sosial, serta dapat memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang pelaksanaan kemampuan manajerial pengurus dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja.
2. *Guna laksana*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengelolaan dana program P2KP dan pihak yang terkait lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan program, perumusan alternatif dalam menetapkan kebijaksanaan, dan memprediksi keadaan organisasi pada masa yang akan datang agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, dalam kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Organisasi dalam berbagai bentuk, termasuk organisasi yang bergerak di bidang sosial tentunya harus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja organisasi tercapai bilamana dapat memanfaatkan sumberdaya yang optimal.

Sumberdaya organisasi terdiri dari: manusia (*men*), uang (*money*), metode (*methods*), bahan-bahan (*materials*), mesin-mesin (*machines*) dan pasar (*markets*), (Terry George. R, 1986: 3).

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja, keberhasilan organisasi sebagai badan usaha dapat ditinjau dari kemampuan atau prestasi yang dicapainya. Cooter dan Yuji (1994:378) menyatakan bahwa: “Pengukuran kinerja adalah ukuran dari efektivitas dan efisiensi operasi suatu perusahaan atau bagian dari suatu perusahaan selama suatu periode”.

Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Komaruddin Sastradipoera, 1989:126). Pelaksanaan program P2KP yang mempunyai tujuan tertentu, yaitu pengelolaan dana oleh organisasi masyarakat (Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM) untuk digulirkan pada anggota masyarakat (Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM) sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dana akan berusaha mengalokasikan sumber dayanya secara rasional.

Pengertian efektivitas dari para ahli pada hakekatnya memiliki kesamaan makna yaitu menitikberatkan pada tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Tercapainya tujuan, tentu saja melalui proses yang melibatkan segala sumberdaya. Dalam penelitian ini penulis menekankan peranan

sumberdaya manusia baik pengelola maupun dalam bentuk partisipasi anggota, sebagai unsur dominan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melihat apakah organisasi BKM dapat mencapai sasaran dan tujuannya, Richard M. Steers (1995:3-5) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk meneliti efektivitas kegiatan organisasi yaitu:

- (1) Konsep optimisasi tujuan.
- (2) Konsep perspektif sistem.
- (3) Tekanan terhadap perilaku.

P2KP tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Desain program mengarah pada peningkatan keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pengambil keputusan yang lebih besar, dengan pendekatan pemberdayaan institusi lokal. Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Berdasarkan desain program P2KP tersebut konsep efektivitas pelaksanaan program P2KP dalam tulisan ini akan ditekankan pada segi sumber daya manusia yaitu pengaruh kemampuan manajerial pengurus (eksekutif) dan tingkat partisipasi anggota (operatif) dalam menghasilkan kinerja yang diharapkan. Keberhasilan organisasi bukan karena keberhasilan seseorang, namun lebih merupakan keberhasilan kolektif yang terdiri dari individu-individu yang berbeda, artinya tim manajemen yang efektif perlu dibangun dengan seksama (Komaruddin Sastradipoera, 2002: 44). Tenaga kerja operatif dan anggota organisasi dapat menentukan tercapainya tujuan organisasi, bilamana ikut berpartisipasi dalam penentuan tujuan organisasi. Penelitian Chabachib (2001) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan partisipasi anggota terhadap kinerja organisasi.

Guna memanfaatkan sumberdaya secara optimal, manajer sebagai tenaga kerja eksekutif sangat berperan dalam mengelola organisasi, dan dalam rangka mencapai tujuannya perlu ditunjang oleh: kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, keterampilan, pengalaman, kewiraswastaan dan motivasi (Stephen P. Robbins, 2001: 3 - 312).

Fungsi kepemimpinan terjadi pada saat seorang manajer memotivasi bawahan, mengarahkan kegiatan orang lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, atau memecahkan konflik antar anggota. Peran manajer terkait dalam pengambilan keputusan, terutama sebagai penanggungjawab dalam menangani masalah-masalah

atau hambatan, manajer mengambil tindakan korektif sebagai tanggapan atas masalah-masalah yang tidak diduga sebelumnya (Stephen P. Robbins, 2001 : 4).

Hasil penelitian Steven E. Abraham et al. (2001), mengatakan bahwa kemampuan manajerial sangat mempengaruhi kinerja organisasi, jika manajer memiliki: *leadership skills, customer focus, result oriented, problem solver, communication skills and team worker*. Begitu pula hasil dari penelitian Asmaddin (2003), menggambarkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kemampuan manajerial terhadap pengambilan keputusan seorang manajer.

Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer antara lain : Keterampilan konseptual (*conceptual skills*), keterampilan kemanusiaan (*human skills*), dan keterampilan teknik (*technical skills*), (Stephen P. Robbins, 2001: 5). Menurut Hani Handoko, (1997: 37) selain ketiga keterampilan tersebut di atas, keterampilan administratif (*administrative skills*) juga harus dimiliki seorang manajer.

Dalam rangka penetapan tujuan, pengelola organisasi perlu didukung oleh individu-individu yang ada dalam organisasi, karena kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Hal tersebut dibuktikan hasil penelitian sebelumnya dari Robert C, et al. (2001) bahwa kinerja organisasi dibentuk dari kinerja individu-individu dalam kelompok yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu seseorang atau individu perlu diberi motivasi, karena motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang atau individu yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku (Gibson et al., 1986: 185). Menurut Stephen P. Robbins, (2001: 166), motivasi adalah kesediaan

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual.

Partisipasi adalah merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab untuk pencapaian tujuan itu (Keith Davis, 1990: 179).

Definisi partisipasi melibatkan tiga gagasan penting yaitu: keterlibatan, kontribusi dan tanggungjawab. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional yang bukan hanya berupa aktivitas fisik. Keterlibatan ini lebih bersifat psikologis dibanding fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlihat egonya dan bukan hanya terlibat pada tugas. Kontribusi, memotivasi orang-orang untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifitasnya guna mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Partisipasi merupakan proses sosial melalui orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mau mewujudkan keberhasilannya.

Bentuk partisipasi berupa: partisipasi psikologis (*psychological participation*), partisipasi tenaga (*physical participation*), partisipasi keahlian (*participation with skill*), partisipasi barang (*material participation*) dan partisipasi uang (*money participation*) (Keith Davis, 1990: 179).

Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan,

terutama mengenai persoalan-persoalan di mana terjadi keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut (Terry George R, 1986: 68).

Hubungan antara kemampuan manajerial dan tingkat partisipasi masyarakat adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yang antara lain: fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pengendalian (Stoner, 1994: 9).

Perencanaan (*planning*) menunjukkan bahwa manajer berfikir melalui sasaran-sasaran dan kegiatan mereka sebelumnya, bahwa kegiatan-kegiatan mereka lebih didasarkan pada suatu metode, rencana, atau pikiran logis ketimbang pada praduga. Langkah-langkah dalam perencanaan adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan 2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumberdaya di kalangan anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Memimpin (*leading*) mencakup hal mengarahkan (*directing*), hal mempengaruhi (*influencing*), memotivasi (*motivating*) karyawan untuk menjalankan tugas-tugas pokok.

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan manajer yang harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian dari manajemen mencakup empat unsur utama: (1) menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja yang sedang berjalan, (3) membandingkan kinerja ini dengan standar yang telah ditetapkan, (4) mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan.

Melaksanakan dan mengembangkan usaha dalam BKM merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota KSM. BKM dapat memperoleh serta mencari laba guna menutup pembiayaan usaha seperti gaji para karyawan, biaya kantor, serta biaya lainnya dan menghimpun cadangan dana untuk modal. Namun laba yang dicari bukanlah laba dalam tingkatan setinggi-tingginya karena BKM bukanlah lembaga yang bersifat *profit oriented* melainkan laba dalam jumlah yang wajar.

Proses pengendalian memastikan bahwa perusahaan sedang mencapai apa yang ditetapkan untuk mencapainya. Proses pengendalian membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan (Wheelen 2001:384). Para manajer dapat menetapkan berbagai pengendalian untuk tetap memfokuskan diri mereka baik dalam aktivitas yang menghasilkan kinerja (perilaku) atau dalam hasil aktual kinerja (*output*). Pengendalian terhadap perilaku menunjukkan bagaimana sesuatu harus dilakukan melalui serangkaian prosedur standar operasi dan pengendalian terhadap output menunjukkan apa yang harus dicapai dengan memfokuskan pada hasil akhir perilaku



tertentu melalui penggunaan sasaran dan target kinerja atau tolok ukur peristiwa (Wheelen, 2001: 391).

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa kinerja adalah perbandingan antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai dalam tujuannya untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan, maka efektivitas pelaksanaan program P2KP dapat diukur dari kinerja BKM dalam pengelolaan dana.

Penilaian efektivitas yang digunakan adalah konsep optimalisasi tujuan, yaitu mengetahui sejauhmana tujuan-tujuan atau sasaran BKM dapat dicapai, mengukur efisiensi dari segi waktu, tenaga dan dana dengan melihat pertumbuhan modal dari laba-rugi yang diperoleh oleh setiap lembaga tersebut, stabilitas, semangat kerja, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi, keterpaduan, keluwesan adaptasi dan penilaian dari pihak luar.

### **1.6 Hipotesis**

Hipotesis merupakan “penjelasan terkaan” (*conjectural explanation*) mengenai fenomena yang diterima atau ditolak oleh bukti empirik, juga merupakan pernyataan tentatif (*tentative statement*) mengenai hubungan yang diharapkan (*expected relationship*) antara dua variabel atau lebih (Komaruddin Sastradipoera, 2005: 90). Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran yang diajukan di atas, berikut ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- 1 : Efektivitas pengelolaan dana P2KP (kinerja BKM) dipengaruhi Kemampuan Manajerial pengurus.
- 2 : Efektivitas pengelolaan dana P2KP (kinerja BKM) dipengaruhi Partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat.
- 3 : Efektivitas pengelolaan dana P2KP (kinerja BKM) dipengaruhi Kemampuan Manajerial dan Partisipasi KSM.



BAB I PENDAHULUAN .....	11
1.1 Latar Belakang .....	11
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	66
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	78
1.3.1 Maksud Penelitian.....	78
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	88
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian .....	89
1.5 Kerangka Pemikiran.....	99
1.6 Hipotesis .....	1717

